

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI TINDAKAN KORUPSI PADA ANGGARAN DI KAB. TEGAL

Istianah, Ida Farida, Krisdiyawati

Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Jln. Mataram No.09 Tegal

Telp/Fax (0283) 352000

ABSTRAK

Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah dilaksanakan enam belas tahun. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan, akan tetapi pelaksanaannya justru banyak terjadi penyelewengan terutama penyelewengan dana atau korupsi ini tidak hanya terjadi di satu daerah tetapi hampir seluruh Indonesia salah satunya adalah Kab. Tegal Sehingga disini dirumuskan motivasi apakah yang mendorong tindakan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tegal? Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder data primer data diperoleh langsung dari sumbernya melalui persepsi masyarakat Kabupaten Tegal. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah penelitian ini. Berupa biografi Kabupaten Tegal tahun 2014 (sebagai lokasi penelitian). Alat analisis yang digunakan adalah dengan bantuan spss untuk menguji data dengan kurtosis skweness kolomogorov-smirnov-test grafik reliabilitas dan regresi untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel terhadap korupsi.

Dari hasil analisis dihasilkan persamaan $Y = 7,571 + 0,402 X_1 + 0,275 X_2 + 0,338 X_3 + 0,157 X_4$ menunjukkan bahwa pertama, aspek perilaku individu dan aspek peraturan UU berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi pemerintahan dan pengawasan merupakan yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang ditunjukkan adalah semuanya positif semakin baik ke empat aspek maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi.

Kata kunci : Otonomi Daerah, korupsi, korupsi berjamaah dan kabupaten Tegal

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sudah berjalan enam belas tahun. Masing-masing daerah melaksanakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi bukan pada sistem sentralisasi atau tergantung pada pusat dengan kata lain adanya beberapa perubahan yang sangat prinsip, salah satunya adalah perubahan dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Pertama, eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal, dan kedua, anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam kebijakan tidak terbatas hanya membuat undang-undang bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan tetapi juga berwenang melakukan pengawasan, investigasi, atas jalannya pelaksanaan undang-undang dan APBD yang telah dibuat. Adapun implementasi lain dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pelimpahan dana dari pusat ke

daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani yang bebas korupsi dan nepotisme ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003).

Namun, pada faktanya pelaksanaan otonomi daerah ternyata banyak mengakibatkan dampak negatif. Menurut Khudori (2004) salah satu yang menonjol adalah munculnya "kejahatan institusional".

Beberapa kasus korupsi APBD yang terjadi di kabupaten Tegal penelitian. Adapun kasusnya sebagai berikut:

1. Kasus proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tahun 2006-2007. yang sudah merugikan uang negara senilai Rp3,955 miliar.

2. Pelanggaran Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal, Agustin Hadiyanto, terdakwa kasus korupsi dana operasional Polres Tegal senilai Rp 6,6 miliar.
3. Kasus korupsi bantuan sosial untuk ternak sapi yang merugikan negara hingga Rp 200 juta merupakan tindakan korupsi berjamaah karena tidak hanya melibatkan delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah periode 1999.
4. Pelanggaran Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan supir anggota DPRD untuk pembangunan masjid yang merugikan negara sebesar Rp.100 juta
5. Tindakan pidana korupsi dana alokasi desa (ADD) yang melanggar pasal 2 dan 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dilakukan kepala desa. Kalau diamati bahwa tindakan korupsi rentan dan dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja dan pada objek apa saja, dimana ada kesempatan disitu kejahatan dilakukan walaupun pelakunya juga orang yang mengerti akan hukum dan agama.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka kami peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI TINDAKAN KORUPSI PADA ANGGARAN DI KAB. TEGAL”

2. Landasan Teori

Menurut UU NO 12 tahun 2001. Korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Aspek-aspek penyebab korupsi

1. Aspek Prilaku individu

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, (h) upaya untuk mengembalikan modal.

Dalam teori kebutuhan Maslow, demikian dikatakan Sulistyantoro (2004) korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi. Selanjutnya, poling yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) berdasarkan jawaban dari 9273 responden, hasilnya menunjukkan sekitar 30,2% korupsi terjadi karena aspek individu demi kepentingan pribadinya. Pola-pola penyimpangan yang terjadi biasanya tidak bekerja pada saat jam kantor (14,2%), pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (10%), dan (6)% adalah biaya pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan adminstarsi (MCW, 2004).

2. Aspek Organisasi Kepemerintahan

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

3. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolitik yang hanya menguntungkan kerabat dan “konco-konco” presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

4. Aspek Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

3. Metode Penelitian

A. Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tegal adapun bahan penelitian yang digunakan adalah berupa data-data, yaitu data primer data diperoleh langsung dari sumbernya melalui persepsi masyarakat Kabupaten Tegal. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah penelitian ini. Berupa biografi Kabupaten Tegal tahun 2014 (sebagai lokasi penelitian).

B. Prosedur penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang terkait.

C. Alat Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan multiple regression,

yaitu berdasarkan nilai p-value, nilai t, nilai F dan kemudian juga akan dianalisis koefisien regresi dan koefisien determinasi. Untuk menganalisis data, digunakan software SPSS for window released 10.05 program.

1. Untuk menghitung apakah masing-masing dari aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD menggunakan regresi berganda. Dengan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y : Korupsi APBD

A : Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ : Koefisien regresi

X₁ : Aspek Perilaku individu

X₂ : Aspek Organisasi Pemerintahan

X₃ : Aspek Peraturan Perundang-undangan

X₄ : Aspek Pengawasan

E : Error

2. Untuk menghitung apakah masing-masing dari aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD menggunakan regresi berganda. (Dengan bantuan SPSS)

3. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi APBD yang terjadi di Kabupaten Tegal.

b. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan, dan aspek pengawasan.

c. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Uji Reliabilitas Dan Validitas

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,5 (J Suprpto, 2009). Untuk mengetahui bahwa pertanyaan yang digunakan dalam instrumen valid, maka digunakan Factor Analysis. Instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai Kaiser lebih besar dari 0,5 sehingga construct validity tepat (j. supranto, 2009). Disamping itu, instrumen dapat dikatakan valid jika Eigen value lebih dari satu.

4. Hasil dan Analisa

A.

Data Demo grafi Resp onde n

Dari 300 Kuesioner yang disebar kepada responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah adalah sebanyak 134, 56 orang diantaranya laki-laki dan 78 orang diantaranya perempuan, rata-rata responden berusia 28 tahun, rata-rata pendidikannya adalah S1 (Sarjana). Selisih pada aspek perilaku individu sebesar 15, aspek organisasi pemerintahan adalah 23, aspek peraturan UU adalah 24, dan aspek pengawasan adalah 23. Sedangkan korupsinya adalah 33. Dengan jumlah nilai total masing-masing aspek dari aspek perilaku individu adalah 4.314, aspek organisasi pemerintahan adalah 3.970, aspek peraturan UU adalah 3.857, dan aspek pengawasan adalah 3.986. Sedangkan korupsinya adalah 5.697.

Dari hasil analisis perbedaan dengan menggunakan analisis perbedaan dengan independent-Sampel-Test dihasilkan tingkat sig. (2-tailed) masing-masing aspek adalah sebagai berikut pada aspek perilaku individu

sebesar 0,375, aspek organisasi pemerintahan sebesar 0,944, aspek peraturan UU sebesar 0,821, aspek pengawasan sebesar 0,769, aspek korupsi sebesar 0,370. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari semua aspek ($>0,05$) apabila ditinjau dari jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan pendapatan secara signifikan. (Lihat lampiran 3 hal 85)

B.

Uji Norm alitas data

Dari anlaisis uji normalitas data dengan menggunakan SPSS tersebut diperoleh data sebagai berikut

- 1) Skewness dan kurtosis masing-masing aspek perilaku individu adalah 0,043 dan -0,502, aspek organisasi pemerintahan adalah -0,332 dan -0,292, aspek peraturan UU adalah -0,244 dan 0,389, aspek pengawasan adalah -0,223 dan -0,123. Dan pada aspek korupsinya adalah 0,020 dan -0,498. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Pada aspek perilaku individu, aspek pemerintahan dan aspek peraturan UU, aspek pengawasan maupun korupsi mempunyai data yang berdistribusi normal karena angka yang dihasilkan adalah nol.
- 2) Dari hasil analisis Kolomogrov-Smirnov-Test dihasilkan masing-masing K-S masing dan probabilitas signifikasi pada perilaku individu sebesar 1,099, dan 0,178, organisasi pemerintahan sebesar 0,852 dan 0,463, , peraturan UU sebesar 1,176, dan 0,126, pengawasan sebesar 1,283 dan 0,074, korupsi sebesar 0,775, dan 0,585. Dari hasil analisis tersebut data secara keseluruhan dari semua aspek baik perilaku individu, organisasi pemerintahan, peraturan UU, dan korupsi dihasilkan diatas 0,05 datanya adalah data berdistribusi normal.
- 3) Menggunakan pengujian dengan grafik histogram bahwa kemencengan garis grafik berada pada posisi tengah atau seimbang tidak menceng kekanan atau pun kekiri pada semua aspek. Baik aspek perilaku individu, aspek organisasi

pemerintahan, aspek peraturan UU, aspek pengawasan maupun aspek korupsi.

- 4) Dengan menggunakan uji reliabilitas data pada masing-masing soal diperoleh Cronbach's Alpha perilaku individu sebesar 69,5, organisasi pemerintahan sebesar 73,8, peraturan UU 71,7, Pengawasan 73,7, dan korupsi sebesar 72,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari masing-masing variabel data normal karena sesuai dengan ketentuan bahwa apabila Cronbach's Alpha diatas 50 maka data dapat dikatakan normal.

C. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Dari tabel 7 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan atau pola interaksi Y atau korupsi dengan aspek perilaku individu (X1), aspek organisasi pemerintahan (X2), aspek peraturan UU (X3), dan aspek pengawasan (X4) adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,571 + 0,402 X1 + 0,275 X2 + 0,338 X3 + 0,157 X4$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Hasil Regresi Hipotesis Pertama

Dari hasil output spss dihasilkan analisis regresi terhadap hipotesis 1 dapat dilihat bahwa aspek perilaku individu berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.025. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah sebesar 0,402, artinya semakin buruk aspek perilaku individu maka korupsi APBD semakin tinggi. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,267 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,66), artinya hipotesis pertama didukung (diterima). Sementara nilai sig sebesar 0,025 adalah > dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel perilaku individu terhadap terjadinya korupsi APBD.

D. Pengujian Hipotesis II dan Pembahasan

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa aspek organisasi pemerintahan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap terjadinya

korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.110. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0,257, artinya semakin baik aspek organisasi pemerintahan maka korupsi APBD akan menurun. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,609, dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (1,66), artinya hipotesis kedua tidak diterima. Sehingga model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek organisasi pemerintahan terhadap korupsi APBD.

E. Pengujian Hipotesis III dan Pembahasan

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa aspek perundang-undangan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.017 (0,017 < 0,05). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah 0,338, artinya semakin berkualitas sistem perundang-undangan maka korupsi akan semakin rendah. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,422, dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,66), artinya hipotesis ketiga diterima sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek perundang-undangan terhadap korupsi APBD.

F. Pengujian Hipotesis IV Dan Pembahasan

Hasil analisis regresi keempat dapat dilihat bahwa aspek pengawasan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,268 dimana sig > 0,05. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah 0,157 artinya semakin tinggi pengawasan yang maka korupsi APBD akan semakin rendah. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,13, dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (1,66), artinya hipotesis keempat ditolak.

G. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Hasil analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Tegal dengan

melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.00. Hasil analisis secara simultan mendukung analisis secara partial. Dilihat dari F hitung sebesar 13,987 sedangkan F tabel sebesar 2,61, sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,00 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh korupsi APBD.

H. Koefisien Determinasi

Dari hasil output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,550, hal ini berarti 55% variasi disebabkan oleh ke empat variabel yaitu perilaku individu, organisasi pemerintahan, peraturan UU, dan pengawasan tersebut sedangkan sisanya yaitu sebesar 45 disebabkan oleh faktor-faktor lainnya yang diluar variabel yang diteliti tersebut.

Standar Error of estimate sebesar 6,222 artinya makin kecil Standar Error of estimate semakin kecil maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel.

5. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang memotivasi terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya di Kabupaten Tegal. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti kongkrit dalam strategi upaya pemberantasan korupsi, juga sebagai bahan untuk wacana masyarakat tentang Korupsi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, aspek perilaku individu dan aspek peraturan UU berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi pemerintahan dan pengawasan merupakan yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukkan adalah semuanya positif semakin baik ke empat aspek maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi.

6. Daftar Pustaka

[1] Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba. Jakarta

- [2] Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Wali Pres, Jakarta
- [3] Andi Hamzah, 2009. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafiko. Jakarta
- [4] Djoko sudantoko, 2003. *Dilema Otonomi Daerah*, BPFE Yogyakarta
- [5] Ermansjasah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafka. Jakarta
- [6] Evi hartanati, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Gina Grafika
- [7] Imom Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- [8] Mudrajad Kuncoro, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga. Jakarta
- [9] Peraturan perundang-undangan Nomor 110 tahun 2000 dan 24 tahun 2004
- [10] Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung
- [11] Kaho, Yosep riwu, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara asatuan republik Indonesia*
- [12] Klitgaard, dkk (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia, Jakarta
- [13] Suprpto J , 2009 *Statistik Teori dan Aplikasi*, Erlangga
- [14] _____, 2014 *kabupaten dalam angka*, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tegal